

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengetian pariwisata dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tidak memiliki batasan-batasan yang pasti. Para ahli pariwisata banyak yang mengungkapkan definisi pariwisata dari berbagai sudut pandang akan tetapi dari berbagai definisi tersebut memiliki makna yang sama. Menurut Sugiana (2011) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah rangkaian aktifitas, penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 4 tentang Kegiatan Kepariwisata, Kegiatan Kepariwisata merupakan kebebasan seseorang untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah sangat mendukung kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh para wisatawan salah satu contohnya adalah dengan membuat fasilitas yang memadai sehingga memudahkan para wisatawan untuk menikmati kegiatan kepariwisataannya.

Menurut Nizar (2012) Pariwisata memiliki kontribusi yang paling nyata terhadap penerimaan devisa negara. Tambahan devisa dari sektor pariwisata selama ini turut mendukung penguatan cadangan devisa, posisi cadangan devisa

yang kuat pada akhirnya akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing terutama terhadap US dollar. Data dari Badan Pusat Statistik (2016) menunjukkan bahwa ranking devisa pariwisata terhadap 11 ekspor barang terbesar selama lima tahun terakhir (2011-2015) selalu mengalami peningkatan. Tahun 2011 yaitu 8.5 miliar US dollar, tahun 2012 9.1 miliar US dollar, tahun 2013 menembus angka 10 miliar US dollar dan tahun 2014 mendekati angka 12 miliar US dollar. Posisi pariwisata dibanding dengan komoditas lain relatif stabil. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwasanya pariwisata merupakan sektor unggulan dalam upaya meningkatkan devisa negara.

Perkembangan pariwisata Indonesia dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, terlihat dari bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Dibawah ini merupakan data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2013-2017:

Tabel 1.1

Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia tahun 2013-2017

Bulan	Kunjungan WisMan 2013	Kunjungan WisMan 2014	Kunjungan Wisman 2015	Kunjungan WisMan 2016	Kunjungan WisMan 2017
Januari	614.328	753.079	723.039	814.303	1.017.968
Februari	678.415	702.666	786.635	888.309	1.023.388
Maret	725.316	765.607	789.596	915.019	1.059.777
April	646117	726.332	749.882	901.095	1.171.386
Mei	700708	752.363	793.499	915.206	1.148.588
Juni	789.594	851.475	815.148	857.651	1.144.001
Juli	717.784	777.210	814.223	1.032.741	1.370.591
Agustus	771.009	826.821	850.542	1.031986	1.393.243
September	770.878	791.296	869.179	1.006.653	1.250.231
Oktober	719.900	808.767	825.818	1.040.651	1.161.565
November	807.422	764.461	777.976	1.104.121	1.062.030

Desember	766.966	915.334	913.826	1.115.265	1.147.031
Jumlah	8.802.129	9.435.411	9.729.350	10.415.326	14.039.799

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2018

Dari tabel di atas menunjukkan setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Antusias wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dapat terlihat dari peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara setiap tahun, ini menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata Indonesia sangat signifikan dan semakin dinikmati oleh wisatawan mancanegara. Indonesia yang merupakan negara besar yang memiliki penduduk 267 juta jiwa (Persatuan Bangsa-Bangsa, 2018) dan merupakan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia maka sudah sepatutnya menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor potensial dengan mengembangkan konsep pariwisata halal. Melihat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai Syariah Islam (Rianto, 2012).

Menurut Ahmad Rosyidi (2016) Pariwisata Halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan islam. Contohnya adalah dalam bentuk pelayanan hotel yang tidak menyediakan minuman beralkohol dan memiliki kolam renang terpisah untuk pria dan wanita, memiliki makanan dan minuman yang halal, dan tempat beribadah mudah untuk di akses. Selain itu, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep islami. Pengembangan pariwisata halal ini dinilai sangat baik dikembangkan baik dari keadaan sosial, ekonomi dan budaya suatu wilayah atau negara. Sebagai unsur

utama dalam pariwisata, masyarakat lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pembangunan pariwisata. Masyarakat setempat secara tidak langsung dapat merasakan dampak dari pariwisata yang ada baik dari sosial ataupun dampak ekonomi.

Saat ini konsep wisata halal menjadi kekuatan baru dalam dunia pariwisata yang sudah mulai berkembang pesat. Di beberapa negara nama wisata halal cukup beragam diantaranya *Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destination, Halal Lifestyle*, dan lain-lain. Pariwisata halal dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai islami. Pada dasarnya wisata halal tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya. Wisata halal memiliki konsep tersendiri yang memudahkan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan berwisata mereka. Kebutuhannya antara lain adanya rumah makan bersertifikat halal, tersedianya masjid atau musholla ditempat umum, adanya fasilitas kolam renang yang memisahkan laki-laki dan perempuan, dan sebagainya (Rosyidi, 2016).

Salah satu usaha yang dilakukan untuk memajukan industri pariwisata halal adalah Kementerian Pariwisata Indonesia mengikuti ajang World Halal Tourism Award 2016 (WHTA) yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Uni Emirate Arab di Abu Dhabi. Tiga provinsi di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal atau *World Halal Tourism (WHT)* yaitu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Sumatera Barat, dan provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Sumatera Barat meraih kategori *World Best Halal Destination, World*

Best Halal Culinary Destination, dan World Best Halal Tour Operator (Kemenpar, 2016).

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi wisata dengan menggunakan konsep wisata halal, provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dengan luas 42.297 km² yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang di bentuk oleh Bukit Barisan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik hasil dari sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4.846.909 jiwa. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut yaitu sekitar 98% dari penduduk Sumatera Barat. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam ini sangat mendukung konsep pariwisata halal.

Selain itu banyak potensi wisata alam yang dimiliki Sumatera Barat yaitu pemandangan, pegunungan, perbukitan, danau dan laut. Potensi ini dikarenakan Sumatera Barat dikelilingi oleh bukit barisan yang terhampar sepanjang pulau Sumatera dan letak yang strategis yaitu di bagian barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Potensi ini didukung penuh oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas yang baik serta sering mengadakan festival dan acara internasional yang menjadi pendorong datangnya wisatawan muslim ke provinsi Sumatera Barat. Beberapa kegiatan internasional yang di diselenggarakan untuk menunjang pariwisata halal di Sumatera Barat adalah lomba balap sepeda *Tour de Singkarak*, event paralayang *Event Fly for Fun* di danau Maninjau, serta kejuaraan selancar *Mentawai Internasional Pro Surf Competition* (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2016).

Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis obyek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu pariwisata Sumatra Barat juga banyak menjual budayanya yang khas, seperti Festival Tabuik, Festival Randang, permainan kim, dan seni bertenun. Disamping wisata alam dan budaya, Sumatra Barat juga terkenal dengan wisata kulinernya. Banyak tempat yang memiliki ciri khas dan daya tarik masing-masing yang mendukung daerah Sumatra Barat sebagai destinasi wisata. Dimana pengembangan pariwisata halal dilihat dari empat komponen usaha pariwisata, yaitu: Perhotelan, Restoran, Biro atau jasa perjalanan wisata, dan Spa (Kemenparekraf, 2015).

Menurut Asosiasi Pengusaha Travel Indonesia Sumatera Barat (ASITA) tahun 2017, dalam pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat masih terdapat permasalahan yaitu pertama, kurang gencarnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga belum dikenal oleh wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Destinasi wisata halal di Indonesia yang telah di kenal dunia hanya Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedua, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat masih kalah jauh dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat dari tahun 2016-2017 yaitu sebanyak 107.425 wisatawan. Berbeda dengan Nusa Tenggara Barat yang kunjungan wisatawan mancanegaranya mencapai 1.430.249 wisatawan.

Tabel 1.2

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kawasan Wisata Halal

Tahun	Sumatera Barat	Nusa Tenggara Barat
2016	49.696	1.404.328
2017	58.829	1.430.249
Jumlah	107.425	2.834.577

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017.

Dari tabel di atas terdapat perbedaan yang sangat jauh antara jumlah wisatawan mancanegara di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat hanya berjumlah 3,8% dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa daya tarik wisata halal di Sumatera Barat terhadap wisatawan mancanegara masih sangat rendah.

Ketiga, masalah selanjutnya yang dihadapi Sumatera Barat dalam mengembangkan pariwisata halal adalah belum adanya landasan hukum yang jelas, pengelolaan pariwisata halal belum didukung oleh aturan dalam bentuk perda. Hal ini menyebabkan pengelolaan pariwisata halal di Sumatera Barat belum berjalan maksimal. Dengan adanya permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan baik dari segi pengelolaan maupun penguatan hukum sehingga pencapaian pariwisata halal di Sumatera Barat lebih baik untuk jangka waktu kedepan.

Dengan adanya permasalahan pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat menjadi perhatian menarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Strategi Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Halal di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan yang terdapat di latar belakang adapun rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata halal di Sumatera Barat ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam strategi pengembangan wisata halal di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui evaluasi strategis Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata halal di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui faktor penghambat mengenai strategi pengembangan wisata halal di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi instansi terkait yang ingin memajukan pariwisata halal di Indonesia khususnya di Sumatera Barat
 - b. Sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan evaluasi pelaksanaan strategi dalam pengembangan wisata halal.
2. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan, terutama dalam konsep pengembangan wisata halal.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penelitian ini diawali dengan melihat penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan guna mencari persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan dilaksanakan dan penelitian yang sudah ada.

Tabel 1.3
Tinjauan Pustaka

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil
1	Lombok : <i>Halal Tourism as a New Indonesia Tourism Strategy</i>	(Firdausi, Marantika, Firdaus, & Sajidah, 2017)	Strategi pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pariwisata halal secara intensif terkhususnya di negara-negara muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan di negara-negara Timur-Tengah
2	Pariwisata Syariah Suatu Konsep kepercayaan dan nilai budaya lokal di Payakumbuh	(Masful, 2017)	Konsep ini muncul dari nilai-nilai islam dan kearifan lokal yang dicampur menjadi suatu tujuan wisata. Dengan tidak menghilangkan esensi dari lokasi wisata yang tidak islami tetapi dapat meningkatkan nilai jual dan ketertarikan bagi paket perjalanan wisata
3	Pengembangan Bandara Udara Dampaknya Dalam Peningkatan Wisata Halal dan Wisata Muslim di Indonesia	(Setiawan, M.Ikhsan; Sukoco, 2017)	Bandara merupakan kunci bagi pengembangan wisata halal di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dengan budaya melayu yang sangat kental akan keislamannya, akan semakin berkembang wisata halal bila disertai dengan percepatan pengembangan bandar udara yang berkelas internasional.
4	Pengaruh Islam Terhadap Perkembangan Pariwisata Halal di Jepang	(Fitri & Nursari, 2017)	Islam sangat mempengaruhi perkembangan industri pariwisata halal di Jepang dikarenakan jumlah populasi muslim di Jepang terus meningkat setiap tahun dan menjadi daya tarik bagi wisatawan muslim
5	Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi	(Jaelani, 2018)	Latar belakang lahirnya perda tentang pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada tiga hal yaitu landasan filosofinya, landasan sosiologisnya, dan landasan yuridis

	Nusa Tenggara Barat		
6	Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal di Kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur	(Wahyulina, Darwini, Retnowati, & Oktaryani, 2018)	Kondisi hotel dan akomodasi yang ada di Sembalun cukup baik. Sedangkan saran dari wisatawan untuk pemerintah dan masyarakat adalah segera menambah pembangunan hotel agar semua wisatawan dapat ditampung serta memperhatikan lokasi pembangunan agar tidak mengganggu pemandangan yang tersedia
7	Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	(Ramadhany & Ridlwan, 2018)	Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari seberapa besar tingkat pendapatan yang di peroleh. Secara keseluruhan pariwisata syariah memiliki implikasi yang positif terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri
8	Upaya Indonesia Meningkatkan Daya Saing Muslim Friendly Tourism di antara Negara-Negara Oki	(Komalasari, 2017)	Upaya Indonesia meningkatkan daya saing MFT diantara negara-negara OKI yaitu melalui <i>Key Faith-Based Needs, Demand Side Key Themes, Supply Side Key Themes dalam COMCEC</i> terbukti berdaya saing dengan peningkatan kualitas MFT
9	Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia	(Awalia, 2017)	Kiat pemerintah dalam mempromosikan wisata NTB di mata dunia memang sangat baik, akan tetapi ada beberapa kepentingan politik bagi pemerintah untuk mengontrol modal di daerah. Ini menjadi bentuk dominasi penguasa terhadap rakyat yakni siapa yang mampu melakukan komodifikasi terhadap wacana maka akan mendapat kontrol penuh terhadap objek kuasanya
10	Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)	(Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, 2013)	Masih kurangnya upaya dari pemerintah daerah kab. Nganjuk yang belum maksimal melakukan promosi pariwisata yang mengakibatkan potensi-potensi objek wisata yang dimiliki tidak berkembang secara maksimal.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan membahas mengenai Eevaluasi

Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan pariwisata halal di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini fokus kepada Aksesibilitas, Transportasi, Fasilitas Daya Tarik dan Kesiapan Masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Evaluasi Strategi

A. Pengertian Evaluasi

Menurut Anderson dalam Winarno (2008) secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan Menurut Sudarwin dalam Zaenuri (2015) definisi evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam definisi tersebut yaitu:

- 1) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi
- 2) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
- 3) Penilaian menunjukkan pemisah antara hasil pelaksana yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Dengan adanya penilaian atau evaluasi tersebut dapat diketahui apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan target atau tidak mencapai target sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut. Proses evaluasi mempunyai fungsi diantaranya :

- 1) Memberikan informasi yang fakta mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai
- 2) Memberi sumbangan pada klarifikasi kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target
- 3) Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain

Selain itu menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai *“the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”*. Artinya, dalam sebuah evaluasi ada beberapa unsur yaitu sebuah proses, perolehan, penyediaan, informasi yang berguna dan alternatif keputusan. Sedangkan Menurut William N. Dunn (2003) secara umum evaluasi dapat disamakan penafsiran, pemberian angka, penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Viljoen dalam Heene Dkk (2010) mengatakan bahwa strategi adalah suatu proses dari identifikasi, pemilihan dan pengimplementasian aktifitas-aktifitas yang dapat memperbaiki kinerja jangka panjang dari sebuah kelompok atau organisasi, melalui penentuan arah maupun penyesuaian antara keterampilan internal dengan sarana-sarana dari organisasi berikut pula dengan lingkungan yang berubah evolutif dimana organisasi itu beroperasi. Sedangkan Menurut Fred R. David (2009) strategi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi semua organisasi yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktifitas dan penglokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.

Selain itu menurut Pearce dan Robinson dalam Amirullah (2015) menyatakan bahwa manajemen strategi didefinisikan sebagai sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Jauch dan Glueck dalam Amirullah (2015) menyebutkan bahwa manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi atau perusahaan. Begitu juga dengan Rangkuti (2006) menyatakan bahwa strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi memiliki tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa strategi merupakan taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan sekelompok orang.

2. Macam-macam Strategi

Menurut Winardi dalam Dercellina (2013), macam- macam strategi adalah sebagai berikut :

a) Strategi yang di rencanakan

Dalam hal ini intensi yang tepat dirumuskan dan ditekankan oleh kepemimpinan sentral tertentu dan ditopang oleh kontrol-kontrol formal guna memastikan implementasi mereka

b) Strategi entrepreneur

Terdapat adanya intensi-intensi, selaku visi pribadi dan yang tidak diartikulasikan dari seorang pemimpin tunggal bersifat adaptif terhadap peluang baru, organisasi yang bersangkutan berada dibawah kontrol pribadi sang pemimpin

c) Strategi ideologi

Terdapat adanya intensi-intensi karena visi kolektif dari semua anggota organisasi yang bersangkutan dikendalikan oleh sejumlah norma kuat

d) Strategi payung

Kepemimpinan mengendalikan kegiatan- kegiatan keorganisasian secara parsial, menetapkan target- target strategis atau batas-batas didalam mana semua pihak harus bertindak

e) Strategi proses

Pihak pemimpin mengendalikan aspek-aspek proses dari strategi yang akan dikerjakan hingga dengan demikian ia memperoleh peluang untuk memengaruhi strategi

f) Strategi yang dipisahkan

Para anggota yang terikat engan longgar dengan organisasi yang bersangkutan, menciptakan pola-pola dalam arus kegiatan mereka sendiri karena tiadanya dengan intensi-intensi umum organisasi yang bersangkutan

g) Strategi konsensus

Melalui tindakan saling menyesuaikan berbagai anggota tentang pola-pola yang mencakup seluruh organisasi karena tidak adanya intensi- intensi sentral atau umum

h) Strategi yang di paksakan

Lingkungan eksternal menetapkan pola-pola dalam tindakan-tindakan melalui pemaksaan secara langsung atau melalui pembatasan pemilihan keorganisasian.

3. Proses Strategi

Menurut Winardi dalam Dercellina (2013) ada sembilan pokok proses perencanaan strategis yaitu :

- a) Kesepakatan awal
- b) Pernyataan mandat
- c) Perumusan visi
- d) Perumusan misi

- e) Analisis kondisi internal
- f) Analisis kondisi eksternal
- g) Penentuan isu-isu strategi
- h) Perumusan strategi, kebijakan dan program-program strategis
- i) Prinsi-prinsip implementasi strategi

C. Evaluasi Strategi

1. Pengertian Evaluasi Strategi

David (2004) menyatakan evaluasi strategi adalah tahap akhir setelah strategi yang diterapkan dalam praktek nyata dinilai efektifitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian tujuan, ia mengemukakan tiga kegiatan dasar dalam evaluasi strategi:

- a) Memeriksa dasar yang mendasari strategi
- b) Membandingkan hasil yang diharapkan dengan rencana yang telah direncanakan
- c) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan rencana

Evaluasi Strategi penting karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dimana faktor eksternal dan internal berubah dengan cepat dan drastis. Selain itu evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan untuk tercapai. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam proses manajemen strategi yang menghasilkan keputusan jangka panjang serta sebagai indikator penilaian antara strategi yang dirumuskan dengan hasil strategi yang dihasilkan. Dalam

evaluasi strategi terdapat tiga kegiatan mendasar yaitu memeriksa dasar, membandingkan hasil dan mengambil tindakan korektif.

2. Proses Evaluasi Strategi

David (2004) menyatakan bahwa proses evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran nilai serta harus merangsang kreatifitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan hanya diakhir periode waktu tertentu atau hanya setelah terjadi masalah.

Selain itu menurut Amir (2011) menyatakan bahwa proses evaluasi strategis dimulai dari apa yang harus diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan maka harus melakukan tindakan koreksi. Ia mengemukakan langkah evaluasi strategi sebagai berikut:

a) Menentukan apa yang harus diukur

Dalam menentukan apa yang harus diukur fokuskan pada elemen-elemen yang paling signifikan yakni sesuatu yang paling banyak perannya dalam pengeluaran atau masalah-masalah lain.

b) Menentukan pengukuran atas kinerja aktual

Pengukuran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Contohnya dengan mengadakan rapat, dorongan akan dirasakan pada rapat evaluasi tersebut dimana para manajer dalam situasi formal akan terdorong untuk menyajikan yang terbaik, sehingga menjalankan aktifitasnya yang terbaik

- c) Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang dibuat

Jika kinerja aktual berada diluar tentang toleransi maka tindakan yang harus diambil untuk mengkoreksi kinerja. Tindakan koreksi yang dibuat diharapkan tidak hanya sekedar memperbaiki atau mengkoreksi penyimpangan tapi yang paling penting adalah agar kesalahan tidak terulang lagi

3. Kriteria Evaluasi Strategi

Terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu strategi dan sekaligus mengisyaratkan apakah strategi itu cukup kredibel untuk direalisasikan. Menurut Rumelt dalam Heene (2010), ciri- ciri tersebut dapat dirinci menjadi empat kriteria yaitu :

- a) Konsistensi

Strategi tidak boleh saling bertentangan antara sasaran dan kebijakan yang telah di rencanakan sebelumnya.

- b) Penyesuaian Diri

Suatu strategi harus senantiasa memberikan respon adaptif atas munculnya kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi

- c) Penciptaan nilai

Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual positif yang mendorong upaya penciptaan nilai seoptimal mungkin

- d) Potensi diri

Suatu strategi harus senantias tidak diperkenankan menilai secara berlebihan terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merekayasa kreasi-kreasi baru yang justru sulit ditangani

1.6.2 Pengembangan Pariwisata

A. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki masalah, menikmati olahraga atau adat istiadat, menunaikan tugas dan lain-lain. Definisi yang lebih luas mengetahui tentang pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat hanya sementara dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai cara untuk mencari kebahagiaan dengan lingkungan baru dan sosial, budaya dan ilmu. Suatu perjalanan yang dikatakan dengan wisata apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu, bersifat sementara, bersifat sementara dalam artian terjadi karena tidak ada paksaan, dan tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah (Spillane dalam Siallagan, 2011).

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah sangat mendukung kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh para wisatawan salah satu contohnya adalah dengan membuat fasilitas yang memadai sehingga memudahkan para wisatawan untuk menikmati kegiatan kepariwisataannya. Sedangkan menurut James J. Spillane (1998: 20) Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, mempernaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Kepariwisataan, Kegiatan Kepariwisataan merupakan kebebasan

seseorang untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelstarian dan mutu lingkungan serta kepentingan nasional.

Adapun kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c) Menghapus kemiskinan
- d) Mengatasi pengangguran
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f) Memajukan kebudayaan
- g) Mengangkat citra bangsa
- h) Memupuk rasa cinta tanah air
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j) Mempererat persahabatan antar bangsa

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi, liburan dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan alam baik dengan keluarga maupun dengan sahabat dan terjadi karena kesadaran sendiri atau tidak karena paksaan.

B. Pariwisata Halal

Pariwisata Halal merupakan suatu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam, fasilitas dan layanan yang disediakan tidak jauh berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam sehingga masyarakat muslim yang menikmati wisata dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan dengan leluasa (Kemenpar, 2012).

Menurut Munir Caudry (2013) Wisata halal merupakan konsep baru dari pariwisata, bukan hanya wisata religi seperti umroh dan haji melainkan wisata halal ini merupakan wisata yang melayani liburan dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Selain itu hotel yang mengusung prinsip syariah tidak boleh melayani minuman yang beralkohol dan mewajibkan memiliki kolam renang dan fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Sedangkan menurut Sofyan (2012: 33) wisata halal memiliki defenisi lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang dilaksanakan atas dasar-dasar nilai Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO) konsumen wisata halal bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.

Menurut Chukaew (2015) ada beberapa faktor standar dalam pengukuran wisata syariah dari sudut administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan, yaitu:

- a) Pelayanan kepada wisatawan haruslah cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan

- b) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam
- c) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam
- d) Restoran harus mengikuti standart internasional pelayanan
- e) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi
- f) Wisatawan muslim mudah untuk melakukan kegiatan keagamaan, dan
- g) Bepergian ke tempat-tempat wisata yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam

Dari karakteristik pariwisata halal yang dijabarkan oleh Chukaew (2015), terdapat empat aspek penting dalam menunjang pariwisata halal, diantaranya :

- a) Lokasi, penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan dalam kaidah Islam dan meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan
- b) Transportasi, penerapan sistem transportasi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan
- c) Konsumsi, penerapan sistem Islam dalam konsep wisata halal sangat penting. Kehalalan dinilai dari sifatnya, perolehan dan pengolahannya.
- d) Hotel, seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan yang disediakan tidak sebatas dalam lingkup makanan dan minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan yang terpisah.

Berikut merupakan tabel perbandingan wisata konvensional, wisata religi dan wisata halal :

Tabel 1.4
Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Syariah

No	Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1	Obyek	Alam, Budaya, Heritage, Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan Sejarah	Mencakup Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spriritualitas	Meningkatkan Spirit Religius dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa, semata mata mencari ketentrangan batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Pemandu	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Menguasai sejarah pokok dan lokasi obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religius wisatawan dan mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam membentuk kebahagiaan dan kepuasan batin
5	Fasilitas ibadah	Hanya sebagai pelengkap	Sebagai pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek wisata, ritual ibadah menjadi paket dalam hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan masyarakat di lingkungan obyek wisata	Komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Komplementer semata—mata untuk mengejar keuntungan	Integrated, interaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah
8	Agenda perjalanan	Mengabaikan waktu	Peduli waktu perjalanan	Memperhatikan Waktu

Sumber: Ngatawi Al Zaztrow, 2015

Dengan melihat tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wisata syariah merupakan wisata yang lengkap karena mencakup wisata konvensional dan

wisata religi di dalamnya. Selain itu wisata halal merupakan wisata yang lebih kompleks dibandingkan dengan wisata konvensional dan wisata religi karena wisata syariah menekankan pada produk halal dan sesuai dengan syariat Islam.

C. Pengembangan Pariwisata Halal

Pengembangan pariwisata menurut Pearce (1981) pengembangan pariwisata adalah usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Yoeti (2008) pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi masyarakat, baik dari ekonomi, dan budaya. Menurut Yoeti ada beberapa yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata didasarkan pada kriteria :

a) Aksesibilitas

Aksesibilitas menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata, ini meliputi biaya, kelancaran dan kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh tujuan wisata

b) Transportasi

Transportasi memiliki dampak yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata. Kelancaran dan kemudahan bagi wisatawan untuk sampai ke lokasi tujuan wisata.

c) Fasilitas

Fasilitas menjadi faktor utama dalam pengembangan wisata, fasilitas yang lengkap serta menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan akan menjadi daya tarik tersendiri dalam menarik wisatawan berkunjung. Kelengkapan fasilitas utama dan pendukung akan membuat kemudahan tersendiri bagi wisatawan

d) Daya tarik wisata

Daya tarik wisata menjadi faktor terpenting dalam pengembangan pariwisata. Obyek wisata harus memiliki keunggulan tersendiri agar menjadi pembeda dan penarik perhatian bagi wisatawan yang berkunjung. Ciri khas yang menarik wisatawan yaitu keindahan alam, iklim, cuaca, kebudayaan, sejarah, kesukuan dan kemudahan dalam menuju tempat tujuan. Selain itu promosi pariwisata kepada masyarakat harus lebih aktif dan menjadi daya tarik tersendiri

e) Kesiapan masyarakat

Masyarakat menjadi aktor utama dalam pariwisata, dalam pengembangan dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Sambutan hangat yang diberikan oleh masyarakat akan membuat wisatawan lebih nyaman dalam berwisata.

1.7 Definisi Konseptual

1. Evaluasi Strategi dalam penelitian ini adalah tahap tahap terakhir dalam proses manajemen strategi yang menghasilkan keputusan jangka panjang serta sebagai indikator penilaian antara strategi yang di rumuskan dengan hasil strategi yang di hasilkan. Dalam evaluasi strategi terdapat tiga

kegiatan mendasar yaitu memeriksa dasar, membandingkan hasil, dan mengambil tindakan korektif

2. Pariwisata halal dalam penelitian ini merupakan suatu konsep pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat islam. Fasilitas dan layanan yang disediakan tidak jauh berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam sehingga masyarakat muslim yang menikmati wisata dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan.

1.8 Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional dalam penelitian Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Sumatera Barat adalah :

1. Evaluasi Strategi
 - a) Konsistensi
 - 1) Fokus kepada target yang ingin dicapai
 - 2) Bertahan terhadap tekanan dari internal ataupun eksternal
 - b) Penyesuaian Diri
 - 1) Memberikan respon adaptif terhadap kendala-kendala dari lingkungan
 - 2) Mencermati *Trend* yang sedang berkembang
 - c) Penciptaan Nilai
 - 1) Memberikan kemudahan agar dapat dicapai

d) Potensi Diri

- 1) Unggul dalam sumber daya dan keterampilan

2. Pengembangan Wisata Halal

a) Aksesibilitas

- 1) Kemudahan dalam mencapai tujuan wisata halal
- 2) Kenyamanan dan keamanan tempat wisata halal
- 3) Biaya yang murah di tujuan wisata

b) Transportasi

- 1) Kemudahan wisatawan menuju tempat wisata halal

c) Fasilitas

- 1) Kelengkapan fasilitas untuk wisata halal
- 2) Kenyamanan dan keamanan fasilitas yang disediakan

d) Daya tarik wisata

- 1) Keunggulan dan keunikan objek wisata halal yang dicari oleh wisatawan

e) Kesiapan masyarakat

- 1) Pelayanan dan keramahan yang diberikan masyarakat kepada wisatawan

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis Evaluasi Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatera Barat adalah Kualitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2015) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berisikan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Selain itu menurut Arikunto (2006) mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengutamakan proses dari pada hasil. Sementara deskriptif memiliki pengertian penggambaran secara menyeluruh. Maka pada hakikatnya penelitian kualitatif deskriptif lebih menekankan pada penggambaran bagaimana proses masalah itu muncul berdasarkan data yang ada di lokasi penelitian.

2. Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan yang dijadikan sebagai obyek penelitian yang berkaitan dengan sesuatu yang akan diteliti. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Sumatera Barat dengan jumlah responden 5 orang. Penentuan unit analisa ini berdasarkan pertimbangan obyektif untuk mendeskripsikan penelitian mengenai Evaluasi Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatera Barat.

3. Jenis Data

Menurut Loftland dalam Sakir (2013) menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari obyek yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Data primer dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Strategi Dinas Pariwisata dala pengembangan wisata halal di Provinsi

Sumatera Barat yang diambil melalui proses wawancara dan dokumentasi langsung kepada unit analisa penelitian

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil oleh peneliti melalui perantara pihak ketiga ataupun data yang diperoleh dari informasi mengenai pariwisata halal di Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari dokumen-dokumen, arsip ataupun literatur terdahulu untuk memaksimalkan pencarian informasi atau data dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan seseorang untuk memperoleh informasi dan keterangan secara lisan dari seseorang responden, dengan cara berbicara langsung bertatap muka dengan responden (Koentjaraningrat dalam Hartadi, 2017). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan pedoman umum yang telah dipersiapkan sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yang berjumlah 5 responden.

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati dan Dian Eka dalam Hartadi, 2017).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moeleong, 2014). Adapun proses dalam teknik analisa data dalaam penelitian ini terdiri dari tiga langkah yaitu:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi (Salim, 2006). Teknik reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga pertanyaan dapat terjawab dengan baik

b) Penyaji Data

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Salim, 2006)

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi.

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Pada penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilah data yang mengarah kepada permasalahan serta menjawab permasalahan yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid (Hartadi, 2017).